

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, H. Try (2016). *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta: PolGov.
- Bungin, Burhan (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Fisher Simon, Ibrahim, Dekka. (2002). *Working With Conflict: Skill & Strategies for Action*. New York : Responding To Conflict.
- Hidayat, Rahmat (2016). OLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN BONTOLERUNG KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA. Makassar, UIN Alauddin Makassar
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kaelan (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: PARADIGMA
- Mantiri, M. Marta (2013). *Analisis Konflik Agraria Di Pedesaan (Suatu Studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi..
- Meliana, Adrianus. (2001). *Konflik, Resolusi Konflik dan Keadilan Alternatif*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Morton & Coleman. (2000). *The Handbook of Conflict Resolution*. Illinois: Waveland Press Inc
- Nasir, Nasrullah (2008). *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Nasoetion, Lutfi I (2002). *Konflik Pertanahan (Agraria)*. Dalam AKATIGA (2002). Menuju Keadilan Agraria. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Poloma, Margaret M (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rasyid, Iqbal Muhammad. (2018). KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT DENGAN CORPORATE (Kasus Penguasaan Lahan oleh PT. Sindoka di Desa Teromu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Universitas Hasanuddin
- Reskiawan, Sukardi (2016). Konflik Agraria (Studi pada PTPN XIV dengan Serikat Tani Polobangkeng di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rianto, Agus (2017). Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria. Volume 5, Nomor. 1. Batam. Universitas Putera Batam.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman (2010). Teori Sosiologi. (Edisi Terbaru). Bantul: Kreasi Wacana.
- Sahlan (2015). Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat). Makassar: Universitas Hasanuddin.

Suharto, Puji Meliani. (TT). KONFLIK AGRARIA DALAM PENGELOLAAN TANAH PERKEBUNAN PADA PT HEVEA INDONESIA (PT HEVINDO) DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR. Bogor. FISIP UNPAD

Soehartono, Irawan (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supardan, Dadang (2007). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Susan, Novri (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

----- (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group

Wahyudi, Andri. (tt). *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan* (file:///C:/Users/ERNA/Downloads/45-Article%20Text-82-1-10-20160304.pdf)

Wallensteen, Peter. (2002). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London: SAGE Publications.

Wiradi, Gunawan (2009). *Reforma Agraria: Prjalanan Yang Belum Berakhir*. (Edisis Revisi). Jawa Barat: Sajogyo Institute, Akatiga dan KPA.

Zakie, Mukmin (2016). *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*. Vol. 24, No. 21. Yogajakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Bersama Kepala Desa Lantibongan



Gambar Lahan yang menjadi sengketa







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Unhas Tamalanrea Makassar, Telp(0411)585024,586200(psw,2211,2100)

Nomor : **2168** /UN4.8.1/PT.01.04/2022

21 Februari 2022

Hal : *Permohonan Izin Melakukan Penelitian*

Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
u.p. Kepala UPT P2T, BKPM Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut :

Nama : Yulia Andika Rusli
NIM : E031181012
Jurusan : Sosiologi
Alamat : Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu (Padang)

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Fungsi Sengketa Lahan dalam Proses Pembentukan Solidaritas Masyarakat Desa Lantimbongan Kepulauan Selayar.**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan pengambilan data/penelitian yang dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya disampaikan banyak terima kasih.



Dr. Phil Sukri S.I.P, M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

NIP 197508182008011008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas (sebagai laporan)
2. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: dpmtsptk.selayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 364/Penelitian/IV/2022/DIS PMPTSPTK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : YULIA ANDIKA RUSLI
Alamat Peneliti : Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu Padang
Nama Penanggung Jawab : DEKAN FISIP UNHAS
Anggota Peneliti : -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Syarat S1" di :

Lokasi Penelitian : Desa Lantibongan
Judul Penelitian : Fungsi Sengketa Lahan Dalam Proses Pembentukan Solidaritas Masyarakat Desa Lantibongan Kabupaten Selayar
Lama Penelitian : 1 Bulan 18 Hari
Bidang Penelitian : Sosial Politik
Status Penelitian : Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2022



Dikeluarkan : Benteng
Pada Tanggal : 4 April 2022

A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS

Digitally signed by
MUHAMMAD ARSYAD,
SKM, MKes, MScPH

MUHAMMAD ARSYAD, SKM, MKes, MScPH

NIP. 19750101 199903 1 010

Rp. 0,-

Tembusan

- 1: Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
- 2: Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 28306/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Kep. Selayar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 2168/UN4.8.1/PT.01.01/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **YULIA ANDIKA RUSLI**
Nomor Pokok : E031181012
Program Studi : Sosiologi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FUNGSI SENGKET LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SOLIDARITAS MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN KABUPATEN SELAYAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Maret s/d 30 April 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

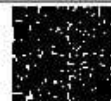
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 18-03-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah konflik sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat desa lantibongan?
2. Bagaimana system kepemilikan lahan?
3. Bagaimana fungsi sengketa lahan pada masyarakat itu sendiri?
4. Bagaimana masyarakat membangun solidaritas masyarakat dalam menghadapi sengketa lahan?
5. Bagaimana hokum adat yang ada di desa lantibongan kabupaten selayar?
6. Bagaimana hubungan yang dibangun Pemerintah dengan masyarakat?
7. Apa bentuk solidaritas yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan lahan yang disengketa?
8. Apa peran pemerintah dalam menengahi perdebatan panjang tersebut?